

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Pada faktor administrasi terjadi kesalahan dalam proses penyusunan perencanaan. Biasanya ada bagian-bagian menyusun perencanaan tidak dalam bentuk RKA (Rencana Kerja Anggaran) tetapi hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan.
2. Pada faktor sumber daya manusia, biasanya setiap SKPD terlambat memberikan pertanggung jawaban kepada pemerintah provinsi NTT
3. Pada faktor perubahan anggaran, biasanya setiap SKPD mereka selalu mengajukan perubahan anggaran kepada pemerintah provinsi, dan ketika pemerintah meminta pertanggung jawaban kepada SKPD mereka tidak dapat memberikan pertanggung jawaban secara tepat waktu..
4. Pada faktor Pengadaan Barang dan Jasa, biasanya pejabat pengelola keuangan terlambat mengajukan kerangka acuan kerja kepada unit layanan pengadaan.
5. Ada beberapa kontraktor pemenang tender, selalu mengambil uang pada triwulan keempat, bukan ada triwulan pertama. Hal ini mengakibatkan

triwulan empat penyerapan anggaran lebih tinggi dari triwulan pertama, kedua, dan ketiga.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur:

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih meningkatkan realisasi anggaran belanja daerah agar segala kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik guna meningkatkan perekonomian provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan agar dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten.
3. Setiap SKPD pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat memberikan pertanggung jawaban agar penyerapan anggaran pada Pemerintah Provinsi lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anfujatin. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban*. Surabaya: Jurnal Universitas 17 Agustus 1945.
- Bachtiar, Arif dkk. 2002. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKP.
- Halim, Abdul 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2016. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nafarin.M. 2009. *Penganggaran Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Dedi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugrahawati, Zusnia. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 di SKPD Kabupaten Tuban*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Putri, Carlin. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Bengkulu*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.

- Setiono. 1995. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah*.
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 *tentang Pengadaan Barang dan Jasa*
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 *tentang pengadaan barang dan jasa*
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 *tentang pengadaan barang dan jasa*